

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada abad ke-19, Pulau Jawa menghadapi berbagai perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan dan tatanan sosial ekonomi. Perubahan ini diawali dengan keruntuhan VOC pada tahun 1799, yang membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan Hindia Belanda. Sejak awal keberadaannya, VOC tidak hanya berorientasi pada perdagangan tetapi juga aktif dalam dinamika politik lokal, sering kali memanfaatkan perselisihan internal di antara elite kerajaan untuk memperkuat pengaruhnya.¹ Dominasi VOC di Jawa tidak semata-mata didasarkan pada kekuatan militer, melainkan juga melalui penerapan strategi diplomatik dan pengikatan perjanjian yang menguntungkan pihak mereka. Transisi kekuasaan dari VOC ke Hindia Belanda membawa dampak besar terhadap struktur administrasi pemerintahan di Pulau Jawa, yang selanjutnya memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas.

Hubungan antara Priangan dan Cirebon tidak hanya mencerminkan integrasi ekonomi kolonial, tetapi juga menjadi wadah pertemuan budaya yang dinamis. Wilayah agraris Priangan membawa tradisi pertanian yang khas, sementara Cirebon, dengan akar kesultanan dan perdagangan maritimnya berfungsi sebagai pusat interaksi budaya pesisir.² Topografi yang beragam, dari dataran rendah di

¹ Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia. Jilid IV*. Jakarta: Balai Pustaka. 1990, hlm-31

² Susanto, Henry, and Sumargono Sumargono. "Runtuhnya Kejayaan Kopi Priangan Tahun 1870-1900." *Journal of Social Science Education* 2.2 (2021): hlm 92-97.

kawasan pesisir hingga pegunungan di pedalaman, menciptakan pola distribusi penduduk yang berbeda. Kawasan pesisir Cirebon memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dengan fokus pada aktivitas perdagangan, sedangkan wilayah pedalaman Priangan lebih berorientasi pada kehidupan agraris yang tersebar di area dengan akses geografis yang lebih terbatas.³

Kabupaten Maja merupakan salah satu wilayah administratif yang dibentuk pada masa pemerintahan Hindia Belanda sejarah Kabupaten Maja saat awal terbentuk sebagai cikal bakal Kabupaten Majalengka sesuai dengan pembentukan daerah otonom *Regentschap Maja staatsblad* 1819 No. 9 tertanggal 5 Januari 1819 No. 23, yang menjelaskan pembagian wilayah Keresidenan Cirebon diantaranya yaitu Kabupaten Cirebon, Bengawan Wetan, Maja, Galuh, dan Kuningan.⁴ Kemudian Kabupaten Maja mengalami perubahan nama menjadi Kabupaten Majalengka pada tahun 1840.⁵

Perubahan nama dari Kabupaten Maja menjadi Kabupaten Majalengka terjadi seiring dengan pemindahan pusat pemerintahan, yang awalnya berada di Maja, kemudian berpindah ke Majalengka hingga sekarang pada tanggal 11 Februari 1840.⁶ Pemindahan ini dilakukan karena Kabupaten Maja terletak di dataran tinggi sehingga untuk mempermudah administrasi, pusat pemerintahan dialihkan ke

³ Lubis, Nina H. *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942*. Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda. 1998, hlm 56

⁴ Kartika. N. *Sejarah Majalengka: Sindangkasih-Maja-Majalengka*. Bandung. Uvula Press. 2007, hlm 24

⁵ *Ibid.*, hlm 2.

⁶ Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Majalengka, *Sejarah Singkat Kabupaten Majalengka* (Majalengka: Pemerintah Kabupaten Majalengka, 2015), hlm. 12–14.

dataran rendah. Hal tersebut didukung oleh kedudukan asisten residen Hindia Belanda yang saat itu berada di Kabupaten Maja.

Kabupaten Maja memiliki letak geografis yang unik, terletak di antara dataran rendah di bagian utara dan pegunungan di bagian selatan. Kondisi ini menjadikan Maja sebagai wilayah dengan keragaman topografi yang memengaruhi pola pemukiman, mata pencaharian, serta potensi ekonominya.⁷ Menjadikannya titik transit strategis dalam jaringan ekonomi regional.

Pada tahun 1819-1839, Kabupaten Maja memiliki arti penting dalam konteks sosial dan ekonomi di wilayah Jawa Barat, khususnya di bawah kepemimpinan Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara. Periode ini bertepatan dengan penerapan sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) oleh pemerintah Hindia Belanda, yang memiliki dampak besar terhadap pola ekonomi dan sosial masyarakat di Kabupaten Maja.⁸ Kabupaten Maja, dengan wilayahnya yang subur, menjadi salah satu daerah penghasil komoditas pertanian utama, terutama kopi, yang menjadi komoditas ekspor penting bagi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa memaksa petani lokal untuk menyerahkan sebagian tanah dan tenaga kerja mereka untuk menanam tanaman ekspor, seperti kopi dan tebu, yang memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi kolonial.

Raden Toemenggoeng Dendanegara adalah bupati pertama Kabupaten Maja, menjabat sejak pembentukan Kabupaten tersebut pada 1819. Beliau berasal dari

⁷ Priatna, Nana. *Majalengka: Sejarah dan Dinamika Sosial Budaya*. Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 45

⁸ Anggapraja, Sulaeman. *Sejarah Jawa Barat*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. 1984, hlm 39

keluarga Kesultanan Cirebon yang memiliki hubungan darah dengan Kerajaan Mataram Islam dan memainkan peran penting dalam proses transisi dari Kabupaten Maja menjadi Kabupaten Majalengka. Perubahan ini melibatkan perpindahan pusat pemerintahan dari Maja ke Majalengka, hingga akhirnya ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai Majalengka pada tahun 1840.

Raden Toemenggoeng Dendanegara dikenal sebagai pemimpin yang visioner, yang turut memfasilitasi pengembangan administrasi kolonial di wilayah tersebut. Raden Toemenggoeng Dendanegara juga terlibat dalam berbagai kebijakan yang mendukung stabilitas sosial dan ekonomi daerah selama masa pemerintahannya. Raden Toemenggoeng Dendanegara merupakan sosok pemimpin yang sangat dihormati dalam lingkup kekuasaan lokal di Cirebon.⁹ Kepemimpinannya tidak hanya terbatas pada administrasi wilayah, tetapi juga berpengaruh dalam dinamika politik lokal, terutama dalam hubungan dengan VOC dan Belanda.¹⁰ Latar belakang keluarganya memberikan legitimasi tradisional yang kuat dalam kepemimpinannya sebagai bupati. Setelah perubahan nama kabupaten menjadi Majalengka pada 1840, ia dipindahkan dan diangkat menjadi Bupati Cirebon.

Pendidikan dan pengalaman yang dimiliki Raden Toemenggoeng Dendanegara mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai tradisional dan modern. Terdidik dalam lingkungan keluarga Cirebon, Raden Toemenggoeng Dendanegara memiliki pemahaman mendalam tentang adat dan budaya lokal. Pengetahuannya tentang

⁹ Achmad Supriyadi, *Sejarah Pemerintahan Lokal di Cirebon: Masa Kolonial hingga Kemerdekaan* (Bandung: Penerbit Nusantara, 2010), hlm. 88–92.

¹⁰ Vlekke, Bernard H.M. Nusantara: *Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008, hlm. 225

sistem administrasi kolonial dan pengalaman dalam birokrasi tradisional menjadi modal penting dalam menjalankan kepemimpinannya. Kebijakan utama yang diterapkan selama masa kepemimpinannya mencakup berbagai aspek pembangunan. Pengelolaan sistem agraria, pengembangan infrastruktur, dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi fokus utama. Implementasi kebijakan kolonial dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan lokal.¹¹

Pencapaian penting selama masa kepemimpinannya terlihat dalam bidang sosial dan ekonomi. Pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal memberikan dampak signifikan bagi perkembangan Kabupaten Maja. Kemampuannya menjaga stabilitas sosial ekonomi di tengah perubahan kebijakan kolonial merupakan prestasi tersendiri.

Pada masa kepemimpinannya, Raden Toemenggoeng Dendanegara menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan otoritasnya di tengah persaingan politik lokal dan intervensi yang kerap datang dari pemerintah kolonial Belanda. Raden Toemenggoeng Dendanegara harus berupaya menjaga stabilitas wilayahnya sambil tetap mengelola hubungan yang rumit dengan Belanda dan masyarakat setempat.¹²

Warisan kepemimpinan Raden Toemenggoeng Dendanegara terlihat dalam pondasi pembangunan Kabupaten Maja yang diletakkannya. Sistem administrasi yang efektif dan jaringan politik yang kuat menjadi modal bagi perkembangan

¹¹ Pembangunan infrastruktur gotong royong: *Memorie van Overgave Bupati Maja 1839* (Arsip Daerah Kabupaten Majalengka, Bundel P-1839)

¹² Vlekke, Bernard H.M. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008, hlm. 240.

wilayah ini di masa selanjutnya. Tradisi kepemimpinan yang dibangunnya memberikan pengaruh jangka panjang.

Pengaruh regionalnya terlihat dari hubungan yang dibangun dengan wilayah-wilayah sekitar. Posisinya dalam jaringan elit Cirebon dan perannya dalam ekonomi regional memperkuat posisi Kabupaten Maja. Pengaruh politik lintas wilayah yang dimilikinya membantu dalam mengelola berbagai kepentingan di tingkat regional.

Topik ini penting untuk dikaji karena meneliti sejarah sosial dan ekonomi suatu daerah dapat memberikan pemahaman mendalam tentang akar masalah, dinamika kekuasaan, serta hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Pengetahuan ini memungkinkan kita untuk mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana dalam merancang kebijakan, menyelesaikan konflik, dan membangun masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Tanpa memahami sejarah sosial dan ekonomi, banyak kebijakan atau program pembangunan yang berpotensi gagal atau bahkan memperburuk masalah yang ada.

Penelitian-penelitian dengan topik yang sama seperti artikel yang berjudul *Sejarah Sosial Ekonomi Kabupaten Majalengka Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda (1819-1942)* yang ditulis oleh Miftahul Falah, skripsi yang berjudul *Kabupaten Majalengka Di Bawah Kepemimpinan Raden Mas Aria Adipati Suriatanudibrata Tahun 1922-1944* yang ditulis oleh Ega Srigina tahun 2021 dan skripsi berjudul *Dinamika Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Kabupaten Majalengka Tahun 1901-1922*, yang ditulis oleh Ongki Bachtiar Sawitno tahun 2023. Ketiga tulisan tersebut membahas tentang sejarah sosial ekonomi Kabupaten Majalengka, namun belum ada yang membahas tentang kondisi sosial dan ekonomi

Kabupaten Maja pada masa kepemimpinan Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kondisi Sosial dan Ekonomi Kabupaten Maja Pada Masa Kepemimpinan Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara Tahun 1819-1839.”

Adapun pertanyaan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana profil Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara?
2. Bagaimana kondisi geografis dan sosial Kabupaten Maja pada masa kepemimpinan Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara tahun 1819-1839?
3. Bagaimana kondisi ekonomi Kabupaten Maja pada masa kepemimpinan Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara tahun 1819-1839?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang ingin dihasilkan atau dicapai oleh peneliti. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Kondisi Sosial dan Ekonomi Kabupaten Maja Pada Masa Kepemimpinan Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara Tahun 1819-1839. Penelitian bertujuan untuk:

1. Menjelaskan profil Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara tahun 1819-1839.
2. Menjelaskan kondisi geografis dan sosial Kabupaten Maja pada masa kepemimpinan Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara tahun 1819-1839.

3. Menjelaskan kondisi ekonomi Kabupaten Maja pada masa kepemimpinan Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara tahun 1819-1839.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai profil bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara, sejarah terbentuknya Kabupaten Maja, dan Kondisi sosial ekonomi Kabupaten Maja terutama pada masa periode kepemimpinan Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara serta memberikan sumbangsih pemikiran bagi para peneliti selanjutnya, sehingga penelitian ini bisa dijadikan sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini sangat bermanfaat Bagi Penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kondisi sosial dan ekonomi Kabupaten Maja khususnya pada masa kepemimpinan Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara.

b. Bagi Pembaca

Pembaca akan diajak untuk menyelami sejarah Kabupaten Maja pada masa kolonial. Penelitian ini menyajikan gambaran yang jelas tentang profil bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara, sejarah terbentuknya Kabupaten Majalengka, dan Kondisi sosial ekonomi Kabupaten Maja terutama pada masa periode kepemimpinan Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara pada masa itu. Dengan membaca skripsi ini, Anda akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam

tentang akar sejarah Kabupaten Maja dan bagaimana kondisi masa lalu memengaruhi kehidupan masyarakat saat ini.

1.5 Tinjauan Teoritis

1.5.1 Kajian Teoritis

1. Teori Struktural Fungsional

Teori Struktural Fungsional menawarkan kerangka analitis yang signifikan untuk memahami dinamika sosial ekonomi Kabupaten Maja pada masa kepemimpinan Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara tahun 1819-1839. Sebagai perspektif sentral dalam sosiologi, teori ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem kompleks yang terintegrasi, di mana berbagai struktur dan institusi sosial berfungsi secara interdependen guna memelihara stabilitas dan kelangsungan sistem. Penerapannya pada konteks historis Kabupaten Maja memungkinkan kajian sistematis mengenai interaksi antara kepemimpinan politik, struktur sosial, aktivitas ekonomi, dan tekanan eksternal kolonial.

Inti teori ini, sebagaimana dikembangkan oleh Talcott Parsons, terletak pada konseptualisasi masyarakat sebagai sistem yang harus memenuhi prasyarat fungsional untuk bertahan atau menjaga keseimbangan (*equilibrium*). Talcott Parsons mengidentifikasi empat imperatif fungsional yang esensial diantaranya Adaptasi , merujuk pada kemampuan sistem menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal dan mengelola sumber daya material, seperti yang terwujud dalam aktivitas ekonomi pertanian, perdagangan, dan kerajinan serta respons terhadap kebijakan Kolonial Belanda di Kabupaten Maja. Selanjutnya Pencapaian Tujuan yaitu kemampuan sistem mendefinisikan dan mencapai tujuan kolektifnya, yang

dalam konteks ini diemban oleh institusi politik kepemimpinan Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara. Selanjutnya Integrasi, menyangkut kemampuan mengoordinasikan dan menyatukan berbagai komponen sistem melalui mekanisme seperti norma sosial, hukum adat, stratifikasi sosial, serta lembaga keagamaan dan kekerabatan. Serta Pemeliharaan Pola, yakni kemampuan mempertahankan dan mereproduksi motivasi individu serta pola nilai budaya dasar melalui keluarga, pendidikan tradisional, dan lembaga keagamaan.

Robert K. Merton memperkaya kerangka ini dengan konsep-konsep kritis. Ia membedakan fungsi manifes (konsekuensi yang diharapkan dan disadari, seperti kebijakan pajak bertujuan mengisi kas Kabupaten) dari fungsi laten (konsekuensi tidak terantisipasi atau tidak disadari, seperti kebijakan pajak yang sama mungkin menimbulkan ketergantungan pada rentenir). Merton juga memperkenalkan konsep disfungsi (konsekuensi yang mengurangi penyesuaian sistem, misalnya kebijakan yang memicu pemberontakan), serta menekankan fungsionalitas relatif (suatu struktur bisa fungsional bagi satu kelompok seperti priyayi namun disfungsional bagi petani) dan alternatif fungsional (berbagai struktur berbeda, seperti kerja wajib versus sistem upah, dapat memenuhi fungsi yang sama).

Relevansi teori ini terhadap kajian Kabupaten Maja pada periode 1819-1839 bersifat multidimensi. Pertama, teori ini memfasilitasi analisis mendalam tentang peran sentral kepemimpinan Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara dalam sistem politik Kabupaten Maja. Kebijakan dan tindakannya dapat dikaji dalam kaitannya dengan fungsi pencapaian tujuan kolektif, seperti mempertahankan ketertiban internal dan memenuhi kewajiban kepada pemerintah kolonial Hindia

Belanda terutama dalam menyongsong era *Cultuurstelsel* yang dimulai sekitar tahun 1830. Di sisi lain, strateginya dalam mengintegrasikan berbagai elemen masyarakat (priyayi, petani, pedagang, ulama) dan struktur kekuasaan tradisional desa di tengah tekanan kolonial menjadi fokus penting, termasuk identifikasi potensi disfungsi dari keputusan politiknya yang mungkin memicu ketegangan sosial dan ekonomi.

Struktur sosial tradisional Jawa (hirarki priyayi-petani, sistem patron-klien, peran desa, lembaga agama) dapat dianalisis sebagai tulang punggung integrasi dan pemeliharaan pola budaya. Kajian dapat mengungkap bagaimana struktur ini berfungsi menjaga ketertiban, legitimasi kekuasaan Bupati, dan reproduksi nilai-nilai budaya. Penting juga untuk mengevaluasi apakah terjadi tekanan atau perubahan pada struktur ini akibat kondisi ekonomi atau kebijakan Bupati/Kolonial, seperti dampak awal sistem tanam paksa terhadap hubungan pemerintah kolonial dan Bupati, serta menilai apakah perubahan tersebut bersifat fungsional (meningkatkan efisiensi) atau disfungsional (memunculkan konflik), termasuk mengidentifikasi fungsi yang mungkin melekat padanya, seperti pemertahanan ketimpangan yang memberikan rasa kepastian.

Kondisi ekonomi Kabupaten Maja, terutama aktivitas pertanian, perdagangan, dan kerajinan, merupakan manifestasi utama fungsi adaptasi sistem terhadap lingkungan fisik dan politik. Analisis dapat menyoroti bagaimana sistem ekonomi tradisional berfungsi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan kewajiban kepada penguasa (fungsi manifes), serta bagaimana kebijakan ekonomi Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara seperti pengelolaan tanah, penetapan pajak/upeti, dan

pengaturan perdagangan memengaruhi kemampuan adaptasi masyarakat, baik dengan meningkatkan maupun menghambat produktivitas dan ketahanan. Identifikasi fungsi laten sistem ekonomi misalnya, menciptakan ketergantungan pada Belanda atau memicu stratifikasi ekonomi baru dan potensi disfungsi seperti kemiskinan struktural atau kerentanan terhadap gagal panen menjadi aspek krusial.

Teori ini memungkinkan analisis hubungan timbal balik antara kondisi ekonomi dan struktur sosial. Penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana fluktuasi ekonomi (surplus/defisit, harga komoditas, beban pajak) memengaruhi integrasi sosial dan pemeliharaan pola budaya, misalnya apakah kemakmuran relatif memperkuat stabilitas atau justru memicu persaingan, atau apakah kesulitan ekonomi melemahkan legitimasi Bupati. Sebaliknya, bagaimana struktur sosial yang ada (hirarki, akses pada sumber daya) membentuk partisipasi ekonomi dan distribusi hasilnya, sehingga pada akhirnya memengaruhi adaptasi sistem secara keseluruhan. Tekanan eksternal, seperti kebijakan kolonial Belanda dan permintaan pasar global, juga perlu dilihat sebagai faktor yang mengganggu atau memaksa penyesuaian pada struktur internal Kabupaten Maja.

Secara holistik, teori struktural fungsional memberikan alat untuk mengevaluasi tingkat stabilitas sistem sosial-ekonomi Kabupaten Maja di bawah Dendanegara. Pertanyaan sentralnya adalah apakah sistem ini relatif stabil atau mengalami gejolak signifikan ditandai disfungsi dan ketidakseimbangan. Hal ini melibatkan penilaian atas sejauh mana kepemimpinan Raden Toemenggoeng Dendanegara berhasil menjadi kekuatan pemelihara keseimbangan di tengah tuntutan ganda: mempertahankan otonomi dan legitimasi lokal sambil memenuhi tuntutan kolonial

yang semakin berat. Faktor-faktor seperti kebijakan Bupati sendiri, rigiditas struktur sosial, meningkatnya tekanan kolonial, dan kondisi alam perlu diidentifikasi sebagai sumber potensial disfungsi dan ketidakstabilan.

Secara keseluruhan, penerapan Teori struktural fungsional terhadap kajian kondisi sosial dan ekonomi Kabupaten Maja pada masa Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara memberikan landasan teoretis yang robust. Teori ini memampukan peneliti untuk mengkonseptualisasikan Kabupaten Maja sebagai suatu sistem sosial-ekonomi-politik yang utuh dan dinamis, menempatkan kebijakan Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara dalam kerangka fungsinya untuk pencapaian tujuan dan integrasi sekaligus mengidentifikasi konsekuensi laten dan disfungsionalnya, menjelaskan interdependensi kompleks antara ekonomi, struktur sosial, dan stabilitas politik, serta mengevaluasi sumber-sumber stabilitas dan ketegangan dalam merespon tekanan eksternal kolonial. Dengan memanfaatkan kekuatan teori, terutama konsep disfungsi dan fungsi laten Merton, penelitian ini dapat menghasilkan analisis historis sosiologis yang mendalam dan sistematis mengenai dinamika internal Kabupaten Maja pada periode awal abad ke-19 yang penuh tantangan ini.

1.5.2 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka diperlukan untuk memudahkan dalam penulisan penelitian ini. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat analisis dengan mengaitkan konsep-konsep dari berbagai buku, karya lain, serta data yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, dalam kajian pustaka ini disesuaikan dengan rumusan masalah “Bagaimana profil Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara”.

Pertanyaan penelitian pertama tentang profil Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara akan menggunakan buku berjudul *Sewindu di Madjalengka Maret 1950-Maret 1958*. Buku *Sewindu di Madjalengka Maret 1950-Maret 1958* karya Bupati ke-13 Raden Mohamad Nur Atmadibrata. Dalam buku ini menjelaskan tentang profil Bupati Kabupaten Majalengka masa ke masa.

Pertanyaan penelitian kedua tentang bagaimana kondisi geografis dan sosial Kabupaten Maja pada masa kepemimpinan Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara tahun 1819-1839 akan menggunakan buku berjudul *Sejarah Majalengka: Sindangkasih-Maja-Majalengka* karya N. Kartika, dalam buku ini menguraikan sejarah Kabupaten Maja saat awal terbentuk Kabupaten Maja sebagai cikal bakal Kabupaten Majalengka sesuai dengan pembentukan daerah otonom *Regentschap Maja staatsblad* 1819 No. 9 tertanggal 5 Januari 1819 No.23 menjelaskan kondisi struktur sosial dari batas wilayah, jumlah penduduk, dan susunan pemerintahan.

Pertanyaan penelitian ketiga tentang bagaimana kondisi ekonomi Kabupaten Maja pada masa kepemimpinan Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara tahun 1819-1839 menggunakan dua pustaka, yaitu buku *Sejarah Kabupaten Majalengka*, Buku ini merupakan karya Prof. Dr. Hj. Nina Herlina Lubis, M. S. dkk dan skripsi *Kondisi Sosial dan Politik Kabupaten Majalengka di Bawah Kepemimpinan Bupati Raden Mohamad Nur Atmadibrata Tahun 1950-1958*. Dalam buku *Sejarah Kabupaten Majalengka* karya Prof. Dr. Hj. Nina Herlina Lubis, M. S. dkk memberikan gambaran komprehensif tentang ekonomi Kabupaten Maja dari aspek komoditas pertanian lokal dan riwayat ekonomi Majalengka pada awal abad ke-19

sangat ditentukan oleh sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda.

Skripsi *Kondisi Sosial dan Politik Kabupaten Majalengka di Bawah Kepemimpinan Bupati Raden Mohamad Nur Atmadibrata Tahun 1950-1958* yang ditulis Thomas Megantara menjelaskan dinamika ekonomi Kabupaten Majalengka pasca pemerintahan Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara.

1.5.3 Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dijadikan sebagai panduan dalam penyusunan proposal penelitian, di mana penulis diwajibkan menyertakan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai referensi. Pertama, artikel dengan judul *Sejarah Sosial Ekonomi Kabupaten Majalengka Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda (1819-1942)* yang ditulis oleh Miftahul Falah yang diterbitkan oleh Patanjala tahun 2011. Persamaan penelitian ini dengan artikel tersebut sama-sama membahas kondisi sosial ekonomi Kabupaten Maja. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan artikel tersebut. Isi artikel tersebut menjelaskan kondisi sosial ekonomi Kabupaten Maja secara menyeluruh dari awal terbentuknya Kabupaten Maja sampai berakhirnya masa kolonialisme Hindia Belanda, sedangkan dalam penelitian ini akan lebih spesifik kepada kondisi sosial ekonomi Kabupaten Maja pada masa kepemimpinan Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara.

Kedua, Skripsi dengan judul *Kabupaten Majalengka Di Bawah Kepemimpinan Raden Mas Aria Adipati Suriatanudibrata Tahun 1922-1944* yang ditulis oleh Ega Srigina tahun 2021, persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas

Kondisi Majalengka di bawah kepemimpinan Bupati, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu akan terfokus pada masa kepemimpinan Bupati Pertama.

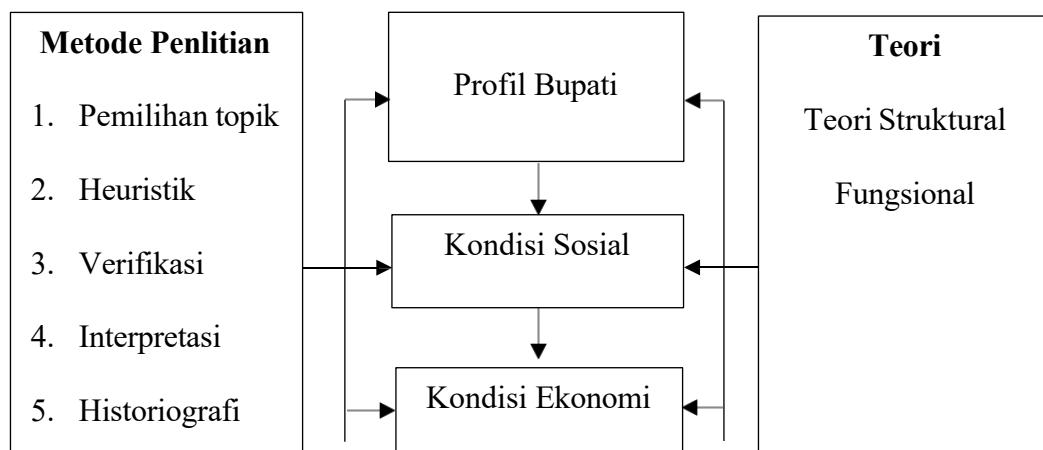
Ketiga, skripsi berjudul *Dinamika Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Kabupaten Majalengka Tahun 1901-1922*, yang ditulis oleh Ongki Bachtiar Sawitno tahun 2023. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini sama-sama menyoroti sosial ekonomi Kabupaten Majalengka namun dengan periode tahun yang berbeda, penelitian ini akan difokuskan kepada awal berdirinya kabupaten Maja pada masa pemerintahan Bupati pertama.

1.5.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dapat diartikan sebagai hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya dari masalah yang diteliti. Penelitian ini mengkaji mengenai Kondisi Sosial dan Ekonomi Kabupaten Maja Pada Masa Kepemimpinan Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara Tahun 1819-1839.

Penelitian ini dimulai dari profil Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara hingga kondisi geografis, sosial dan ekonomi Kabupaten Maja pada masa Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara tahun 1819-1839.

Gambar 1. Kerangka Konseptual



1.6 Metode Penelitian Sejarah

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode sejarah sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kuntowijoyo, metode sejarah terdiri dari pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi dan penulisan sejarah atau histografi sebagai syarat melakukan penelitian sejarah.¹³

1.6.1 Pemilihan Topik

Pemilihan topik merupakan langkah awal dari penelitian. Pemilihan topik digunakan untuk menentukan permasalahan yang hendak dikaji dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian hendaknya topik dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual¹⁴. Kedekatan emosional dalam penelitian berarti adanya hubungan perasaan yang mendalam antara peneliti dan topik yang dipilih, sedangkan kedekatan intelektual dalam penelitian merujuk pada kesesuaian antara pengetahuan, minat akademis, dan latar belakang keilmuan peneliti dengan topik yang dipilih.¹⁵ Kedekatan emosional ini muncul karena Kabupaten Majalengka merupakan daerah tumbuh dan berkembangnya penulis serta sosial dan ekonomi merupakan keilmuan yang penulis sukai. Hal ini menjadi salah satu alasan kuat bagi peneliti untuk mengangkat dan mendalami topik ini, karena adanya rasa ingin tahu dan rasa ingin mengulik tentang sejarah pemerintahan Kabupaten Maja masa itu. Kedekatan intelektual peneliti dengan topik ini juga berakar dari latar belakang peneliti sebagai mahasiswa sejarah. Melalui perspektif akademis, peneliti

¹³ Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm 75

¹⁴ *Ibid*, hlm. 70.

¹⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 45–47.

merasa penting untuk mengangkat sejarah lokal, yang sering kali kurang mendapatkan perhatian yang layak.

1.6.2 Heuristik

Tahap selanjutnya dalam metode penelitian sejarah yaitu heuristik. Pada tahap ini, peneliti mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan, baik primer maupun sekunder, yang berkaitan dengan Kabupaten Maja. Sumber yang biasa digunakan dalam penelitian sejarah terdiri atas sumber primer dan sekunder¹⁶. Sumber primer dapat berupa dokumen arsip, surat pribadi, berita surat kabar pada masa itu, dan kesaksian orang-orang yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Sumber sekunder mencakup buku-buku sejarah, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas sejarah Kabupaten Maja.

Selanjutnya, teknik pengumpulan sumber yang dilakukan penulis adalah studi pustaka sebagai metode pengumpulan data yang diarahkan pada pencarian data dan informasi melalui dokumen, arsip, buku, catatan, foto, maupun data elektronik yang dapat mendukung proses penelitian sejarah. Sumber-sumber ini penulis dapatkan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PEPRUSNAS), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Majalengka (PERPUSDA) dan Website Delpher platform digital yang menyediakan akses ke koleksi besar sumber-sumber sejarah, termasuk koran, buku, dan majalah dari Belanda. Situs ini dikembangkan oleh *Koninklijke Bibliotheek* (Perpustakaan Nasional Belanda) dan mitra-mitra lainnya. Adapun beberapa buku lain yang

¹⁶ Nina Herlina Lubis, *Metode Sejarah* (Bandung: Satya Historika, 2020). Hlm 20

merupakan koleksi milik pribadi dan beberapa sumber yang berasal dari berbagai artikel jurnal.

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah bahan yang berasal dari zaman yang sedang dibicarakan, ditulis atau dihasilkan oleh orang yang terlibat langsung dengan peristiwa atau situasi yang sedang dikaji¹⁷.

A. Arsip Dokumen

- 1) ANRI. *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* No. 23 Tahun 1819, tanggal 5 Januari 1819. Jakarta: ANRI.

Arsip ini memuat *Besluit* (Keputusan) Komisaris Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang pembentukan *Regentschap Maja* sebagai daerah administratif baru dalam wilayah Karesidenan Cirebon. Dalam dokumen ini dijelaskan pembagian wilayah administratif menjadi lima *regentschap*: Cirebon, Bengawan Wetan, Maja, Galuh, dan Kuningan.

- 2) ANRI. *Staatsblad van Nederlandsch-Indië* No. 7 Tahun 1840 tentang *Naamsverandering van het Regentschap Madja (Residentie Cheribon)*. Batavia: *Landsdrukkerij*, 1840. Jakarta: ANRI.

Staatsblad No. 7/1840 berisi keputusan pemerintah Hindia Belanda tentang perubahan nama Kabupaten Maja menjadi Kabupaten Majalengka, serta pemindahan ibu kota kabupaten dari Sindangkasih ke lokasi yang kini menjadi Kota Majalengka. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi wilayah dalam Karesidenan Cirebon.

¹⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm 73

- 3) ANRI. *Inspectie Bericht over de Residentie Cheribon*, Agustus–Oktober 1838 (ANRI, Kode ADK 597) Jakarta: ANRI.

Laporan inspeksi yang dilakukan oleh pejabat kolonial terhadap sistem administrasi, pertanian, dan keamanan di wilayah Karesidenan Cirebon. Dalam laporan ini terdapat catatan mengenai kondisi distrik-distrik yang tergabung dalam *Regentschap Maja*.

- 4) ANRI. *Aantooning van den Stand der Indigo-Kultuur in de Residentie Cheribon*, 19 Oktober 1841, No. 73 (ANRI, Kode ADK 615) Jakarta: ANRI.

Arsip ini memuat laporan tentang perkembangan budidaya tanaman indigo dan kopi di wilayah Karesidenan Cirebon, termasuk Maja, yang menjadi bagian penting dalam sistem tanam paksa kolonial. Dokumen ini memberi gambaran tentang tekanan ekonomi yang dihadapi rakyat setempat.

- 5) ANRI. Inventaris Arsip Cirebon 1829. *Staats der Bevolking: dienstjaar 1829*. No. 66/3. *Regentschappen Madja Residentie Cheribon*. Jakarta: ANRI.

Berisi data kependudukan *Regentschap Madja* tahun 1829. Tercatat jumlah penduduk sebanyak 132.257 jiwa, dengan 99,26% pribumi dan mayoritas non-pribumi adalah etnis Tionghoa. Jumlah keluarga tercatat 32.271. Arsip ini penting untuk mengetahui kondisi sosial dan struktur demografi Maja pada masa awal pemerintahannya.

B. Sumber Sekunder

penulisan sejarah berdasarkan laporan atau kesaksian orang lain yang tidak mengalami langsung peristiwa yang dikaji, tetapi menyajikan informasi yang berasal dari sumber primer¹⁸.

- 1) Kartika. N. 2007. *Sejarah Majalengka: Sindangkasih-Maja-Majalengka*.
- 2) Atmadibrata, Mohamad N. *Sewindu di Majalengka Maret 1950-Maret 1958*
- 3) Lubis, Nina H. Dkk. *Sejarah Kabupaten Majalengka*
- 4) Lubis, Nina H. 1998. *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942*. Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.
- 5) Lubis, Nina H. 2000. *Sejarah Kota-Kota Lama di Jawa Barat*.
- 6) Abdullah, Taufik. 1990. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- 7) Anam, Suyitno et.al 1991. *Bunga Rampai Jawa Barat*. Bandung: Yayasan Wahana Citra Nusantara.
- 8) Kartodirdjo, Sartono (ed.). (1984). *Sejarah Nasional Indonesia IV: Abad Kesembilanbelas*. Jakarta: Balai Pustaka.
- 9) Kartodirdjo, S., & Suryo, D. (1991). *Sejarah perkebunan di Indonesia: kajian sosial-ekonomi*.
- 10) Falah, M. (2011). Sejarah Sosial Ekonomi Majalengka pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda (1819-1942). *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research*, 3 (2), 190-209.

¹⁸ *Ibid* hlm 98

1.6.3 Verifikasi

Setelah mengumpulkan sumber, peneliti perlu melakukan kritik terhadap sumber-sumber tersebut. Tahap kritik sumber yang dilakukan yaitu kritik eksternal dan kritik internal¹⁹.

1. Kritik Eksternal: Peneliti harus memastikan keaslian sumber, apakah sumber tersebut autentik dan sesuai dengan konteks zaman. Penulis melakukan kritik eksternal terhadap dokumen *Besluit* No. 23 Tahun 1819 dengan memverifikasi keasliannya melalui perbandingan dengan dokumen resmi lain dari tahun yang sama dan memastikan bahwa dokumen tersebut tersimpan di lembaga arsip yang kredibel.
2. Kritik Internal: Memverifikasi isi dari sumber, yaitu apakah informasi yang terkandung di dalamnya valid dan dapat dipercaya, serta menghindari bias yang mungkin terdapat pada sumber tersebut. Sedangkan untuk kritik internal, penulis memverifikasi isi *besluit* tersebut dengan membandingkan narasi pengangkatan Bupati Maja dengan catatan kontemporer lain, serta mengkaji apakah ada bias kolonial dalam narasi yang disampaikan.

Misalnya, dokumen dari arsip pemerintah perlu dipastikan keaslian dan ketepatannya, sementara artikel di surat kabar perlu diperiksa dari sisi subjektivitas penulis .

1.6.4 Interpretasi

Tahap keempat yaitu interpretasi. Pada tahap interpretasi, peneliti menganalisis dan menafsirkan fakta-fakta sejarah yang telah diverifikasi. Peneliti perlu

¹⁹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013). Hlm 77

menyusun narasi tentang Kondisi Sosial dan Ekonomi Kabupaten Maja Pada Masa Kepemimpinan Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dalam tahap ini antara lain: Bagaimana profil Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara? Bagaimana kondisi geografis dan sosial Kabupaten Maja pada masa kepemimpinan Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara tahun 1819-1839? Bagaimana kondisi sosial ekonomi Kabupaten Maja pada masa kepemimpinan Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara tahun 1819-1839?

Peneliti juga harus mempertimbangkan berbagai perspektif dan menyusun analisis yang objektif, dengan memperhatikan konteks sosial dan ekonomi pada saat itu.

1.6.5 Historiografi

Setelah dilakukan Interpretasi dilanjut dengan tahapan historiografi adalah tahap proses penulisan sejarah yang berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan diberbagai sumber yang telah melewati semua tahap. Dalam penulisan historiografi harus disusun secara objektif dan sistematis.²⁰ Pada tahap ini penulis akan menguraikan informasi sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dibuat.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian yang berjudul “Kondisi Sosial dan Ekonomi Kabupaten Maja Pada Masa Kepemimpinan Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara Tahun 1819-

²⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm 81.

1839 ”, terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan yang disusun sebagai berikut.

Pada bagian BAB I Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang, rumusan masalah, kegunaan penelitian serta tinjauan teoritis, metode penelitian sejarah dan sistematika pembahasan yang menjadi landasan untuk bab selanjutnya.

BAB II membahas profil Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara, mulai dari kehidupan awal, kebijakan dan kepemimpinannya sampai akhir hayatnya agar pembaca mengetahui biografi Bupati pertama Kabupaten Majalengka.

BAB III membahas kondisi sosial masyarakat Kabupaten Maja pada masa kepemimpinan Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara tahun 1819-1839 yang akan menjelaskan tentang kondisi geografis, struktur sosial, interaksi sosial, data penduduk, dan kondisi sosial.

BAB IV membahas kondisi ekonomi Kabupaten Maja pada masa kepemimpinan Bupati Raden Toemenggoeng Dendanegara tahun 1819-1839 yang akan menjelaskan tentang kondisi ekonomi sebelum tanam paksa dan sesudah tanam paksa, selain itu akan menjelaskan tentang interpretasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial dan dampak kebijakan Bupati Raden Toemenggung Dendanegara.

BAB V kesimpulan dan saran. Memuat kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang dibuat secara uraian padat.